

## Transformasi Digital dan Dinamika Masyarakat Multikultural di Era Society 5.0

Alimin Alwi

Program Studi S3 Ilmu Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

\*Corresponding Author, Email: [alimin.alwi@unm.ac.id](mailto:alimin.alwi@unm.ac.id)

---

### Abstrak

Era *Society* 5.0 menunjukkan adanya kemajuan besar dalam penggabungan teknologi digital dengan kehidupan sosial masyarakat. Proses digitalisasi yang berlangsung dengan cepat membawa pengaruh besar bagi dinamika masyarakat multikultural di Indonesia. Dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kohesi sosial dan inklusi budaya, keberagaman etnis, budaya, dan agama menghadapi tantangan baru sekaligus peluang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digital terhadap pola interaksi, komunikasi, dan identitas sosial masyarakat multikultural di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis tinjauan pustaka. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial, namun juga dapat memperkuat segregasi dan polarisasi jika tidak didukung oleh literasi digital dan pendekatan multikultural yang inklusif. Dengan demikian, diperlukan kebijakan dan strategi sosial yang adaptif agar *Society* 5.0 menjadi ruang bersama yang adil untuk semua kelompok budaya.

**Kata Kunci:** Kohesi Sosial, Literasi Digital, Masyarakat Multicultural, Society 5.0, Transformasi Digital.

---

### PENDAHULUAN

Munculnya konsep Society 5.0 sebuah masyarakat yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital secara harmonis, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mencapai puncaknya. Pemerintah Jepang pertama kali memperkenalkan konsep ini sebagai visi strategis untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0, dengan menempatkan manusia di pusat transformasi teknologi. Dalam kerangka Society 5.0, teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Internet of Things*, *big data*, dan robotika digunakan tidak hanya untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan solusi sosial yang inklusif dan berkelanjutan (Dhirani, Mukhtiar, Chowdhry, & Newe, 2023; Potocan, Mulej, & Nedelko, 2021).

Di tengah keragaman budaya yang ada di Indonesia, transformasi digital membawa dampak tidak hanya pada sektor ekonomi dan industri, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam ranah sosial budaya. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, serta keragaman agama dan kepercayaan, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat beragam. Interaksi masyarakat yang tadinya berlangsung secara langsung kini beralih ke ruang digital, menciptakan arena baru untuk ekspresi identitas, pertukaran nilai, dan komunikasi antarbudaya (Irwana & Hermawan, 2022; Nursangadah, Fitrah, Agustiningasih, Husna, & Ni'mah, 2022). Ruang digital, meskipun seharusnya menjadi medium untuk integrasi

sosial, dapat berubah menjadi medan konflik sosial baru jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam ranah digital, representasi dari identitas budaya menjadi lebih cair dan terbuka. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda kini dapat menunjukkan simbol-simbol budaya mereka di media sosial, memperkenalkan tradisi lokal melalui konten kreatif, dan membentuk komunitas secara online lintas wilayah (Alice Evangaline Jebaselvi, Mohanraj, Thangamani, & Ramesh Kumar, 2023). Namun, bersamaan dengan itu, munculnya hate speech, stereotip etnis, dan polarisasi sosial yang didorong oleh algoritma dari platform digital menunjukkan bahwa teknologi tidak bersifat netral. Ia memiliki implikasi ideologis dan politis yang dapat memperkuat atau malah mengikis semangat kebersamaan dan toleransi antar budaya. Society 5.0 memberikan harapan baru untuk membangun masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered society*). Namun, dalam konteks multikultural, kompleksitas sosial dan keberagaman nilai menjadi tantangan unik dalam proses adaptasi terhadap teknologi. Contohnya, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses dan tingkat literasi digital yang setara. Ketimpangan ini menyebabkan terjadinya eksklusi sosial digital, di mana kelompok minoritas atau yang terpinggirkan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskursus publik, atau memanfaatkan layanan digital dari pemerintah maupun swasta.

Selain itu, terdapat tantangan dalam memahami cara kerja algoritma digital yang memperkuat echo

chamber dan filter bubble. Pengguna media sosial umumnya terpapar konten yang memperkuat pandangan mereka sendiri, yang dapat memperkecil ruang dialog antarkelompok. Dalam masyarakat yang multikultural, situasi ini dapat menimbulkan segregasi kultural yang tidak terlihat jelas, tetapi cukup memengaruhi persepsi sosial dan hubungan antar komunitas. Oleh sebab itu, analisis terhadap cara transformasi digital membentuk kembali hubungan sosial, distribusi pengetahuan, dan representasi budaya di tengah keragaman masyarakat Indonesia menjadi penting. Untuk memahami bahwa digitalisasi bukan hanya isu teknis, tetapi juga masalah sosial, budaya, dan bahkan etika, diperlukan pendekatan interdisipliner. Transformasi digital di era Society 5.0 harus dipahami sebagai arena pertempuran nilai, identitas, dan kekuasaan simbolik, di mana berbagai kelompok berupaya menampilkan diri mereka di ruang publik digital.

Ruang digital dapat menjadi sarana pemberdayaan bagi komunitas lokal dan marginal, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, dengan syarat ada dukungan berupa kebijakan inklusif dan pendidikan literasi digital yang tersebar merata. Contohnya, komunitas adat bisa memanfaatkan platform digital untuk menjaga kelestarian budaya, menciptakan narasi sendiri mengenai sejarah dan identitas mereka, serta secara mandiri mempromosikan pariwisata berbasis budaya. Di sisi lain, tanpa adanya pedoman etika dan regulasi yang jelas, ruang digital dapat disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, intoleransi, dan manipulasi politik yang didasarkan pada sentimen etnis atau agama (Sujoko, 2020). Society 5.0 dalam konteks ini seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai produk teknologi, melainkan sebagai sebuah proyek peradaban yang menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberagaman sebagai fondasi utama. Integrasi teknologi dan masyarakat perlu diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial, memperluas inklusi digital, dan mempertemukan berbagai identitas dalam semangat saling pengertian. Oleh karena itu, tantangan multiculturalisme di era digital tidak perlu dihindari, melainkan harus dikelola dengan sadar dan beretika melalui kebijakan sosial, pendekatan partisipatif, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara di mana transformasi digital di era Society 5.0 membentuk kembali dinamika masyarakat multikultural di Indonesia. Fokus utama terletak pada

bagaimana ruang digital berfungsi sebagai arena bagi kontestasi dan kolaborasi budaya, serta bagaimana negara dan masyarakat sipil dapat merancang strategi bersama untuk menjadikan teknologi sebagai kekuatan pemersatu, bukan pemecah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana transformasi digital memengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia pada era Society 5.0. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan kaya makna. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen terhadap literatur, artikel jurnal, laporan kebijakan, serta data digital yang relevan seperti konten media sosial dan berita daring (Machi & McEvoy, 2024). Analisis data dilakukan secara tematik dengan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan Kesimpulan (Braun & Clarke, 2022; Roseveare, 2023). Peneliti mencari pola-pola umum dalam dinamika interaksi sosial di ruang digital, khususnya terkait dengan isu keberagaman budaya, komunikasi antar kelompok, dan ekspresi identitas. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan referensi silang antara literatur akademik dan data empiris dari media digital. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana teknologi digital berperan dalam membentuk pola relasi sosial, serta bagaimana masyarakat multikultural merespons perubahan tersebut dalam kerangka Society 5.0.

## PEMBAHASAN

### Society 5.0 dan Transformasi Digital

Konsep *Society 5.0* merupakan respons visioner terhadap tantangan era Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi tidak hanya digunakan untuk kepentingan industri dan ekonomi semata, tetapi juga untuk menciptakan solusi terhadap masalah sosial yang kompleks. Dalam masyarakat 5.0, teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data*, dan robotika dimanfaatkan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan (Rochman, Odah, Chofyan, & Sakti, 2020). Namun, dalam implementasinya, transformasi digital yang menjadi fondasi *Society 5.0*

justru menghadirkan paradoks sosial yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, digitalisasi membuka akses informasi yang luas, mempercepat interaksi sosial, dan mendorong partisipasi warga dalam berbagai aspek kehidupan. Media sosial dan platform daring, misalnya, telah menjadi ruang vital bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, membangun komunitas lintas wilayah, dan menyuarakan kepentingan kelompok minoritas yang sebelumnya tidak terwakili dalam media arus utama. Akan tetapi, di sisi lain, ruang digital juga menciptakan lapisan-lapisan baru dari ketimpangan sosial. Fenomena seperti *digital divide* (kesenjangan digital) menjadi masalah nyata, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai (Dijk dalam Upe, 2024). Dalam konteks masyarakat multikultural, hal ini berimplikasi pada marginalisasi digital terhadap kelompok-kelompok adat, etnis minoritas, dan komunitas lokal yang belum terfasilitasi secara adil dalam ekosistem teknologi.

Transformasi digital juga mengubah pola komunikasi dari yang bersifat dialogis menjadi interaktif tetapi seringkali instan dan dangkal. Algoritma platform media sosial cenderung menciptakan *echo chamber* yang mengurung pengguna dalam pandangan dan nilai-nilai homogen. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi sempit, intoleransi meningkat, dan polarisasi sosial diperparah oleh penyebaran disinformasi yang masif. Ini merupakan ironi dari cita-cita *Society 5.0* yang mengusung prinsip inklusi sosial berbasis kemanusiaan (Pira, 2023). Kritik juga dapat diarahkan pada bagaimana teknologi dikembangkan dan dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan sensitivitas budaya. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, platform digital sering kali tidak memperhatikan keberagaman bahasa, norma lokal, dan struktur sosial adat. Ini menyebabkan proses transformasi digital cenderung mengadopsi model universal Barat yang belum tentu kontekstual dengan budaya lokal. Akibatnya, muncul resistensi budaya, krisis identitas, dan erosi nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi penyangga kohesi sosial.

Dengan demikian, transformasi digital dalam kerangka *Society 5.0* perlu dikaji secara kritis sebagai sebuah proses sosial yang sarat makna dan konsekuensi. Ia bukan sekadar kemajuan teknis, melainkan juga arena kontestasi kekuasaan, representasi identitas, dan pembentukan makna sosial baru. Tanpa pendekatan humanistik dan multikultural yang kuat, *Society 5.0*

berpotensi menjadi utopia teknokratis yang menjauh dari realitas sosial masyarakat yang kompleks dan beragam. Oleh karena itu, perumusan kebijakan transformasi digital perlu melibatkan berbagai aktor sosial, termasuk komunitas lokal, lembaga adat, dan tokoh masyarakat, agar transformasi teknologi benar-benar menjadi kekuatan emansipatoris, bukan instrumen hegemonik. Teknologi harus diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial, memperluas partisipasi kultural, dan merayakan keragaman sebagai kekayaan, bukan sebagai hambatan pembangunan.

### **Masyarakat Multikultural dan Tantangan Digital**

Indonesia adalah negara multikultural yang kompleks, ditandai dengan keberagaman etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat yang menyatu dalam satu wilayah nasional. Pluralitas ini selama bertahun-tahun menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam kehidupan berbangsa (Tyas & Naibaho, 2020). Dalam konteks transformasi digital dan perkembangan *Society 5.0*, realitas multikultural ini tidak serta merta menjadi lebih harmonis. Justru, dalam banyak kasus, ruang digital memperlihatkan bagaimana ketegangan antaridentitas semakin mengemuka melalui platform daring. Ruang digital di Indonesia saat ini telah menjadi arena baru bagi interaksi sosial lintas budaya. Namun, alih-alih menjadi ruang dialog yang inklusif dan terbuka, media digital sering kali justru mereproduksi stereotip, prasangka, dan eksklusi simbolik. Misalnya, komentar yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) berbasis etnis atau agama begitu mudah tersebar melalui media sosial tanpa kontrol yang memadai. Dalam banyak kasus, identitas kultural dijadikan alat politisasi atau komodifikasi untuk kepentingan ideologis tertentu. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi, bila tidak dikawal dengan etika dan kesadaran multikultural, dapat memperdalam fragmentasi sosial.

Salah satu tantangan terbesar dalam masyarakat multikultural adalah bagaimana ruang digital memperkuat fenomena *filter bubble* dan *echo chamber*—yakni kondisi di mana algoritma media sosial menyajikan informasi yang selaras dengan pandangan pengguna, dan menyaring yang berbeda (Peralta, Neri, Kertész, & Iñiguez, 2021). Akibatnya, individu semakin terkurung dalam kelompok-kelompok homogen yang mempersempit ruang empati terhadap kelompok lain. Dalam masyarakat multikultural, situasi ini sangat berbahaya karena berpotensi menumbuhkan intoleransi kultural dan memperkuat segregasi sosial yang tidak kasat mata. Selain itu, ketimpangan akses terhadap teknologi

atau *digital divide* merupakan tantangan struktural yang memperburuk ketimpangan sosial yang telah ada sebelumnya. Masyarakat adat, komunitas di daerah terpencil, atau kelompok ekonomi lemah sering kali tidak memiliki akses terhadap perangkat digital, koneksi internet yang stabil, maupun keterampilan digital yang memadai. Akibatnya, mereka tersingkir dari proses produksi dan distribusi informasi, serta minim representasi dalam diskursus publik digital. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai *eksplusi digital*, yakni keterlibatan sosial yang terbatas akibat keterbatasan akses teknologi.

Di sisi lain, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan utama dalam membangun ruang digital yang sehat dan inklusif. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kecakapan berpikir kritis, memahami konteks informasi, dan menyadari konsekuensi sosial dari setiap aktivitas digital. Dalam konteks masyarakat multikultural, literasi digital harus diarahkan untuk mengembangkan kesadaran lintas budaya dan kemampuan berdialog secara etis di ruang virtual. Tanpa pendekatan kritis terhadap penggunaan teknologi, ruang digital di Indonesia justru berpotensi menjadi arena yang mempertegas perbedaan dan memperuncing polarisasi identitas. Padahal, digitalisasi semestinya menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan, memperkuat kesetaraan, dan menciptakan solidaritas baru di tengah kemajemukan. Oleh karena itu, perlu ada intervensi kebijakan yang tegas dalam bidang literasi digital berbasis multikulturalisme, termasuk penguatan kurikulum pendidikan, regulasi platform digital, serta pelibatan aktif komunitas akar rumput.

Lebih jauh, dibutuhkan pemikiran ulang terhadap cara kita memaknai teknologi dalam kehidupan multikultural. Apakah teknologi hanya kita pandang sebagai alat, atau sebagai ruang budaya yang harus diisi dengan nilai-nilai dialogis dan reflektif? Jika masyarakat digital tidak dibentuk secara sadar dengan semangat inklusif, maka transformasi digital hanya akan menjadi instrumen hegemonik yang memperkuat dominasi budaya tertentu dan menyingkirkan suara-suara pinggir. Dengan demikian, tantangan masyarakat multikultural dalam era digital bukan hanya tentang teknis infrastruktur atau algoritma, tetapi menyangkut ideologi, nilai, dan praktik sosial. Masyarakat Indonesia harus merumuskan ulang relasi antara keberagaman dan teknologi secara kontekstual, agar ruang digital

benar-benar menjadi milik bersama, bukan hanya milik mereka yang paling keras bersuara, paling cepat terhubung, atau paling dominan secara budaya.

### **Strategi Penguatan Kohesi Sosial di Era Digital**

Tantangan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat multikultural menjadi semakin rumit di era Society 5.0, fase kemajuan peradaban yang menggabungkan teknologi digital dan kecerdasan buatan demi peningkatan kualitas hidup manusia. Masyarakat yang bersifat multikultural terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, budaya, dan latar belakang sosial yang saling berdampingan (Babaii, 2018). Keragaman ini merupakan sebuah kekayaan, tetapi juga dapat menimbulkan gesekan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Dengan demikian, strategi yang diperlukan harus bersifat normatif sekaligus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Tiga strategi yang bisa dievaluasi secara mendalam dalam konteks ini adalah: pendidikan multikultural berbasis teknologi, literasi digital yang menjangkau semua kalangan, dan kebijakan digital yang adil.

#### **1. Pendidikan Multikultural Berbasis Digital**

Langkah pertama adalah memasukkan nilai-nilai multikultural ke dalam pendidikan digital. Dalam kerangka Society 5.0, pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas fisik, tetapi berlangsung secara fleksibel melalui platform digital. Dengan demikian, pendidikan multikultural perlu disesuaikan dengan medium digital agar pesannya dapat sampai kepada generasi muda yang hidup di era digital-native. Konten edukatif yang berbasis media sosial, e-learning, dan game edukatif interaktif perlu menyertakan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan (Putra & Suyadi, 2022).

Ia mengkritik bahwa banyak konten digital saat ini justru mereproduksi stereotip dan bias budaya karena tidak dirancang dengan mempertimbangkan sensitivitas multikultural. Dengan demikian, kurikulum digital yang dirancang dengan penuh kesadaran menjadi sangat berperan. Konten yang menyajikan narasi lintas budaya, cerita rakyat dari berbagai daerah, serta simulasi interaksi antarbudaya dapat memperbesar kesadaran interkultural para peserta didik. Pendidikan digital tidak hanya berkaitan dengan transfer informasi, tetapi juga dengan pembentukan sikap dan nilai. Dengan demikian, pendidikan multikultural berbasis digital dapat menjadi pondasi karakter yang harmonis dan inklusif.

## 2. Literasi Digital yang Inklusif

Strategi kedua berhubungan dengan penguatan literasi digital yang bersifat inklusif. Di dalam masyarakat Society 5.0, akses terhadap informasi sangatlah luas, namun tidak semua orang memiliki kemampuan yang setara untuk memahami, memfilter, dan memverifikasi informasi tersebut. Aspek kognitif dan etis, seperti membedakan informasi hoaks, menghargai perbedaan pendapat, dan berkomunikasi secara etis di ruang digital, juga termasuk dalam literasi digital selain kemampuan teknis menggunakan perangkat. Ruang digital dapat berubah menjadi medan konflik jika masyarakat tidak memiliki literasi digital yang memadai dan inklusif (Subroto, Supriandi, Wirawan, & Rukmana, 2023). Contohnya, komentar-komentar yang mengandung kebencian terhadap kelompok tertentu sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman tentang keberagaman.

Dengan demikian, pelatihan literasi digital perlu dirancang secara holistik dan inklusif tidak hanya ditujukan kepada kelompok terdidik, tetapi juga kepada komunitas marginal, lansia, dan masyarakat pedesaan. Beberapa cara untuk menjadikan literasi digital benar-benar inklusif adalah dengan menggunakan bahasa lokal dalam pelatihan, menerapkan metode partisipatif, dan menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan, LSM, dan pemerintah untuk bersinergi dalam mengembangkan modul literasi digital yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Jika literasi digital dibangun secara merata dan berkesinambungan, potensi konflik di ruang digital dapat diminimalkan, dan masyarakat akan lebih mampu berinteraksi dengan etis dan toleran.

## 3. Kebijakan Digital yang Berkeadilan

Strategi ketiga yaitu menyoroti pentingnya kebijakan digital yang adil dan inklusif. Dalam praktiknya, desain platform digital sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan seperti masyarakat adat, minoritas agama, atau penyandang disabilitas. Akibatnya, mereka terpinggirkan dari diskursus publik digital dan tidak memiliki ruang untuk menyuarakan identitas dan kepentingan mereka. Kebijakan digital yang berkeadilan berarti menjamin bahwa infrastruktur digital, regulasi, dan algoritma platform dirancang untuk memastikan keterlibatan semua elemen masyarakat. Contohnya, pemerintah bisa mengatur agar platform media sosial menyediakan fitur dalam berbagai bahasa daerah atau mengatur sistem

moderasi konten agar tidak berpihak pada kelompok tertentu. Di samping itu, data privasi dan keamanan pengguna dari kelompok marginal harus dijaga dengan ketat agar tidak terjadi eksploitasi atau diskriminasi.

Namun, tantangan utamanya adalah minimnya representasi kelompok minoritas dalam proses perumusan kebijakan digital. Oleh karena itu, partisipasi publik yang inklusif dalam perancangan kebijakan digital menjadi hal yang mutlak. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan komunitas-komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat multicultural (Harefa & Lase, 2024). Ketiga strategi pendidikan multikultural berbasis digital, literasi digital yang inklusif, dan kebijakan digital yang berkeadilan merupakan pendekatan komplementer yang saling memperkuat. Dalam kerangka Society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat teknologi, keharmonisan masyarakat multikultural hanya dapat dicapai jika pendekatan teknologi dikombinasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesetaraan. Tantangannya tidak ringan, tetapi dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen jangka panjang, masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis bukanlah utopia, melainkan keniscayaan yang dapat diwujudkan.

Namun, minimnya representasi kelompok minoritas dalam proses kebijakan digital menjadi tantangan utamanya. Oleh karena itu, partisipasi publik yang inklusif dalam perancangan kebijakan digital merupakan aspek yang memiliki banyak aspek. Pemerintah harus membangun jalur komunikasi dengan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa hasil studi secara akurat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat multikultural. Ketiga strategi tersebut-pendidikan multikultural berbasis digital, literasi digital yang inklusif, dan kebijakan berbasis digital-merupakan pendekatan yang saling melengkapi dan sangat efektif. Dalam konteks Society 5.0, yang memandang manusia sebagai budak teknologi, harmoni antarbudaya hanya bisa dicapai jika kemajuan teknologi dipadukan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan. Tantangannya memang tidak ringan, namun melalui kolaborasi lintas sektoral dan komitmen jangka panjang, masyarakat yang inklusif, damai, dan harmonis bukanlah mimpi, melainkan keniscayaan yang dapat dicapai.

## KESIMPULAN

Transformasi digital dalam kerangka Society 5.0 menawarkan potensi besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Namun, peluang tersebut juga diiringi oleh tantangan sosial yang signifikan. Digitalisasi telah mengubah cara individu dan kelompok berinteraksi, menyampaikan identitas, dan membentuk komunitas, tetapi juga memperlihatkan sisi gelap seperti ujaran kebencian, disinformasi, eksklusivitas sosial, dan polarisasi identitas. Dalam masyarakat multikultural, teknologi digital dapat menjadi alat pemersatu jika dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan humanistik. Namun, tanpa literasi digital yang kuat, kepekaan budaya, dan kebijakan yang adil, ruang digital justru berisiko memperkuat ketimpangan sosial dan fragmentasi budaya. Kesenjangan akses teknologi, rendahnya kemampuan berpikir kritis, serta dominasi algoritmik memperbesar risiko marginalisasi terhadap kelompok rentan dan minoritas. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat digital di era Society 5.0 harus diarahkan pada penciptaan ruang interaksi yang dialogis, setara, dan saling menghargai perbedaan. Hanya dengan strategi yang sadar konteks dan partisipatif, transformasi digital dapat benar-benar menjadi jalan menuju kemajuan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

## REFERENSI

- Alice Evangaline Jebaselvi, C., Mohanraj, K., Thangamani, A., & Ramesh Kumar, M. (2023). The Impact of Social Media on the Evolution of Language and Communication Trends. *Shanlax International Journal of English*, 12(1).
- Babaii, E. (2018). Multiculturalism: An asset or a problem? Implications for intercultural education. *Intercultural Communication Education*, 1(2).
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic Analysis: A Practical Guide. *QMiP Bulletin*, 1(33).
- Dhirani, L. L., Mukhtiar, N., Chowdhry, B. S., & Newe, T. (2023). Ethical Dilemmas and Privacy Issues in Emerging Technologies: A Review. *Sensors*. <https://doi.org/10.3390/s23031151>
- Harefa, A. T., & Lase, B. P. (2024). Peran Pendidikan dalam Mengurangi Stigma dan Diskriminasi terhadap Siswa dari Kelompok Minoritas Sosial. *Journal of Education Research*, 5(4), 4288–4294.
- Irwana, T. M., & Hermawan, D. (2022). Cultural Identity of Attack On Titan Fans on Social Media Twitter in Indonesia. *IZUMI*, 11(2).
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2024). *The Literature Review: Six Steps to Success. The Literature Review: Six Steps to Success*.
- Nursangadah, A., Fitrah, P. F., Agustiniingsih, S., Husna, F. N., & Ni'mah, U. K. (2022). Multikulturalisme di Indonesia: Relevansi Pancasila, Islam, dan Kebangsaan. *ALSYS*, 2(2).
- Peralta, A. F., Neri, M., Kertész, J., & Iñiguez, G. (2021). Effect of algorithmic bias and network structure on coexistence, consensus, and polarization of opinions. *Physical Review E*, 104(4).
- Pira, F. (2023). Disinformation a problem for democracy: profiling and risks of consensus manipulation. *Frontiers in Sociology*, 8.
- Potocan, V., Mulej, M., & Nedelko, Z. (2021). Society 5.0: balancing of Industry 4.0, economic advancement and social problems. *Kybernetes*, 50(3).
- Putra, A. F. M., & Suyadi, S. (2022). The Concept of Neuroscience-Based Inclusive Islamic Education for Millennial Generation: A Literature Review. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1).
- Rochman, G. P., Odah, Chofyan, I., & Sakti, F. (2020). Understanding the smart society in rural development. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (447).
- Roseveare, C. (2023). Thematic Analysis: A Practical Guide, by Virginia Braun and Victoria Clarke. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 38(1).
- Subroto, D. E., Supriandi, Wirawan, R., & Rukmana, A. Y. (2023). Implementasi Teknologi dalam Pembelajaran di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Dunia Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(07).
- Sujoko, A. (2020). Satirical political communication 2019 Indonesia's presidential election on social media. *Informasi*, 50(1).
- Tyas, E. H., & Naibaho, L. (2020). A Harmony Among Of Religious Community Is Required Amidst The Covid-19 Pandemic. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 8(9).
- Upe, A. (2024). *Pengantar Sosiologi: Konsep Dasar dan Arah Pengembangannya*. Literasi Indonesia.